



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**HAK MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI KASUS MEREK USAHA DAGANG SATE
KMS DI KOTA PADANG)**

JURNAL

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH

ULFA NOVITA SARI

11527202360

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1440 H/ 2019 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Sketsa dengan judul "Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Merek Usaha Dagang Sate KMS Di
Pekanbaru)", yang ditulis oleh:

: Ulfa Novita Sari

: 11527202360

: Hukum Bisnis

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

Syafrinaldi, S.H., M.A.

NIP: 198109232006041004

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul "HAK MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS STUDI KASUS MEREK USAHA DAGANG SATE KMS DI KOTA PADANG)", yang ditulis oleh:

Nama : ULFA NOVITA SARI
NIM : 11527202360
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 12 November 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Irdaus, SH., MH

Sekretaris
Iham Akbar, SHI, SH., MH

Penguji I
Turhidayat, SH., MH

Penguji II
Asril, SHI., MH

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

ERNI, S.Sos, MM
NIP. 19680226 199103 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Penggunaan merek terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Dalam suatu persaingan usaha yang tidak sehat, sangat rawan terjadinya pelanggaran merek. Di Indonesia telah disahkan Undang-Undang Tentang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai bentuk perlindungan terhadap merek-merek terdaftar. adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Telah diaturnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak menghilangkan sama sekali terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Judul Skripsi adalah “Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Merek Usaha Dagang Sate KMS Di Kota Padang)”. Penelitian ini di laksanakan di Kota Padang pada Usaha Dagang Sate KMS. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyelesaian Merek Usaha Dagang Sate KMS di Kota Padang Yang Digunakan Oleh Pihak Lain, serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Merek Usaha Dagang Sate KMS di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat yang dilakukan langsung di lapangan. Sumber pertama melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun studi kepustakaan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Usaha Dagang Sate KMS benar bahwa mereknya telah terdaftar dan merek tersebut disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Akibat dari penggunaan merek tanpa izin tersebut, pemegang merek KMS mengalami kerugian yang cukup drastis. Adapun upaya yang dilakukan pemegang merek adalah mencoba untuk menegur pihak yang menggunakan merek tanpa seizin pemilik merek, melakukan klarifikasi di setiap media-media, dan melakukan pembuktian bahwa daging yang digunakan halal. Dalam penyelesaian merek usaha dagang Sate KMS menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pemegang merek mengenai hukum dan penyelesaiannya, serta kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu' alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Segala Puji hanya bagi Allah SWT. yang dengan rahmat dan hidayah nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **"Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Merek Usaha Dagang Sate KMS Di Kota Padang)"**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap menuju alam yang penuh dengan cahaya Iman dan Islam.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhoan Allah SWT dan do'a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapinya dengan baik. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan do'a berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua yang tercinta dan terkasih, Ayahanda Djonsirwan dan Ibunda Sulastri yang telah begitu tulus dan bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan moril demi penulis menyelesaikan kuliah,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta juga selalu mendoakan dan memberikan motivasi maupun semangat agar penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor, beserta Jajarannya. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta beserta Wakil Dekan I, II dan III, yang telah memberikan surat izin penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih.

4. Bapak Firdaus, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Muslim, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh perkuliahan di perguruan ini.

5. Bapak Firdaus, S.H, M.H selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan arahan dan masukan ilmu kepada penulis pada masa perkuliahan dan mengerjakan tugas akhir.

6. Bapak Syafrinaldi, S.H, M.A selaku pembimbing skripsi yang telah bermurah hati untuk meluangkan waktu dan fikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak M.Alpi Syahrin, S.H. M.H selaku dosen yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staf Akademik yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada kakak penulis Lola Febriani, S.E, abang penulis Randy Nofriwan dan Ivan Setiawan serta keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a, kasih sayang dan motivasi kepada penulis.
10. Terima kasih kepada teman-teman, Juni Kasmira, Nanny Nabila, Shinta Dahlia Fatmawati, Sri Ayu Pratiwi, Susmita, Tiva Chairunnisa, Yozi Nofrionata beserta teman-teman Ilmu Hukum F, teman-teman Hukum Bisnis A dan juga teman-teman KKN Polak Pisang, dan yang terkhusus kepada Beni Andalas Putra yang telah memberikan semangat, motivasi, dan arahan kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati, semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 12 November 2019
Penulis,

ULFA NOVITA SARI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	19
A. Sejarah Kota Padang	19
B. Letak Geografis Kota Padang	21
C. Kependudukan.....	24
D. Sejarah Usaha Dagang Sate KMS.....	25
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Pengertian Merek, Hak Atas Merek dan Pemilik Merek	27
B. Fungsi dan Manfaat Merek	29
C. Persyaratan Merek dan Iktikad Baik	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Pendaftaran Merek	32
E. Jangka Waktu Pelanggaran Merek Terdaftar	35
F. Perlindungan Atas Pelanggaran Merek Terdaftar	37
G. Ketentuan Pidana Hak Atas Merek	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 46

A. Penyelesaian Merek Usaha Dagang Sate KMS di Kota Padang Yang Digunakan Oleh Pihak Lain Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	46
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Merek Usaha Dagang Sate KMS di Kota Padang	56

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

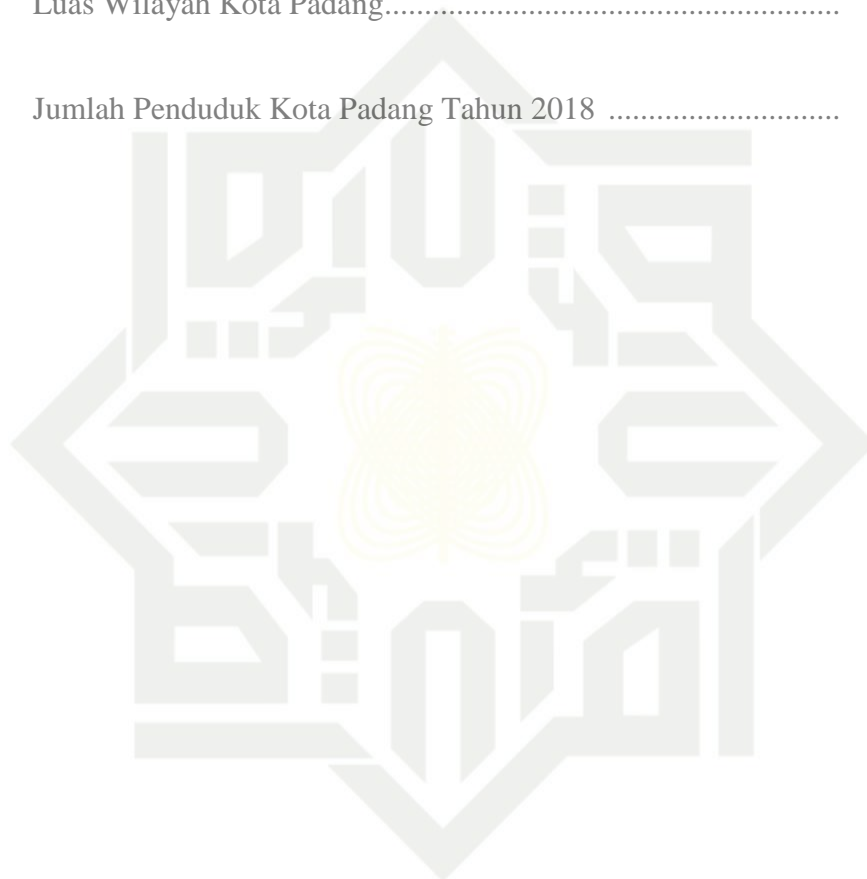
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Populasi	14
Tabel II.1	Luas Wilayah Kota Padang.....	23
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Kota Padang Tahun 2018	24



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.¹ Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat, produsen akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya. Tanda inilah yang disebut sebagai merek. Pada dunia bisnis, merek dapat menjadi elemen penting karena dapat memberikan keunggulan berkompetisi ketika bermain di pasar yang dibidik bagi pemiliknya. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pula merek ini dapat menjadi pemicu untuk memunculkan berbagai inovasi baru bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat menguntungkan publik juga perusahaan itu sendiri.²

Di Indonesia, kekayaan intelektual untuk logo/symbol dagang sebagai kekayaan intelektual diberikan hak hukum berupa merek.³ Sebagai suatu tanda, merek digunakan agar konsumen dengan mudah mengenali suatu produk, mengingat tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsi. Perlindungan hukum terhadap merek sangat perlu dilakukan karena semakin berkembangnya dunia perdagangan yang rawan terhadap terjadinya pelanggaran merek. Dalam dunia perdagangan saat ini sering sekali terjadi perebutan pasar yang tidak sehat, tidak simpatik, bahkan kadang tidak mengindahkan nilai-nilai etis dalam perdagangan. Apabila tidak diimbangi dengan masalah kepastian, perlindungan serta penegakan hukum maka pembangunan nasional yang dicita-

² Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (PT: Citra Aditya Bakti, 1993), h.5.

³ Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan yang terakhir diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

citakan tidak akan dapat tercapai, malah semakin mengakibatkan ekonomi negara semakin merosot.

Setiap merek menampilkan wujud reputasi yang bernilai moral, material, dan komersial. Reputasi yang melekat pada merek merupakan suatu bentuk hak milik. Reputasi dalam dunia usaha yang dipandang sebagai kunci bagi sukses atau tidaknya suatu bisnis, dimana banyak pengusaha yang berlomba-lomba untuk memupuk ataupun menjaga reputasinya dengan menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan. Bagi para pedagang atau pengusaha, merek merupakan salah satu media untuk memperoleh reputasi baik dalam kepercayaan dari konsumen. Selain itu, pencetus merek tersebut dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah dipakai tersebut. Apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu produk tersebut tidak akan dikenal oleh konsumen.

Merek menjadi faktor penting dalam persaingan dan menjadi aset perusahaan yang bernilai dikarenakan dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk mengembangkan dan memelihara loyalitas pelanggan. Karena merek yang kuat akan membangun loyalitas, dan loyalitas akan mendorong bisnis terulang kembali serta menjadikan penghalang bagi masuknya pesaing lainnya. Merek adalah nama, istilah, tanda, symbol/lambang, desain, warna, gerak, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk lainnya.⁴

Merek juga merupakan suatu alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Selain dari itu pemberian merek dapat menunjukkan kualitas dari barang dan jasa. Tetapi dalam prakteknya ataupun dalam kenyataannya tidak jarang terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek barang terdaftar sehingga bentuk usaha persaingan yang tidak jujur, pemalsuan atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.⁵

Merek membedakan satu produk makanan dari produk usaha dagang lainnya. Merek yang kuat akan membuat suatu produk lebih menonjol walaupun berada diantara banyak produk sejenis lain yang saling merebut hati konsumen. Ada beberapa produk makanan yang dijual beberapa perorangan pada masyarakat yang memicu persaingan kuat antara pedagang satu dengan yang lainnya. Di pihak konsumen, mereka punya banyak pilihan dari berbagai produk yang memiliki keutamaan sehingga kepuasan mereka terpenuhi. Oleh karena itu

⁴ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), h.104.

⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta: Penerbit Yustisia, 2010), h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peranan merek sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum seperti peniruan, pemalsuan, atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek terdaftar maka perlu dilakukan pengawasan dan perlindungan.

Kasus pelanggaran merek yang dilakukan oleh para pelaku usaha adalah sebab reputasi merek terkait. Mengingat fungsi merek sebagai identitas suatu produk atau jasa yang telah mempunyai reputasi dan juga terkait dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Hal ini dikarenakan di dalam merek melekat keuntungan ekonomis, terutama merek terkenal. Agar setiap produsen atau pengusaha atau pedagang mempunyai jaminan perlindungan hukum terhadap hak atas merek barang dagangannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mewajibkan merek tersebut didaftarkan. Dengan terdaftarnya merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, barulah pemegang merek akan diakui atas kepemilikan merek produk dagangannya.

Salah satu kasus merek Sate KMS yang terjadi di Kota Padang. Pedagang sate yang menggunakan bahan baku daging babi dan memakai merek KMS. Merek KMS tersebut merupakan suatu merek dagang yang telah memperoleh hak atas merek melalui pendaftaran pada tahun 2010 di Kantor Merek sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁶ Tindakan yang dapat menimbulkan kerugian ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah mengatur mengenai sistem perlindungan merek, namun pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran merek di Indonesia khususnya di Kota Padang. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian ini dan memilih judul **“Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Merek Usaha Dagang Sate KMS di Kota Padang)”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka penulis memfokuskan pembahasan tentang Penyelesaian Merek Usaha Dagang Sate KMS Yang Digunakan Oleh Pihak Lain serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.⁷ Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Merek Usaha Dagang Sate KMS di Kota Padang

⁶ Wawancara dengan pemilik atau penanggungjawab Sate KMS.

⁷ Burhan Ashhafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h.118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang Digunakan Oleh Pihak Lain Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

2. Apa Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Merek Usaha Dagang Sate KMS di Kota Padang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Penyelesaian Merek Usaha Dagang Sate KMS di Kota Padang Yang Digunakan Oleh Pihak Lain Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Untuk mengetahui Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Merek Usaha Dagang Sate KMS di Kota Padang.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan penelitian yang diharapkan oleh penulis penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Penyelesaian Merek Usaha Dagang Sate KMS di Kota Padang Yang Digunakan Oleh Pihak Lain Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Kendala Yang Dihadapi.
- b. Bagi pembaca semoga dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan dalam mencari perbandingan khusus bagi mahasiswa dan masyarakat umum lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan terhadap ruang lingkup yang sama.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konseptual atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan atau kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka “*theore’ma*” atau ajaran.⁸

Teori yang akan dipergunakan dalam kerangka teoritis:

1. Hak Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya Hak Milik Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang nantinya akan menghasilkan suatu proses atau produk karya yang bermanfaat. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual

⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, melalui cipta, rasa, dan karyanya. Sehingga karya cipta tersebut menimbulkan HKI bagi pencipta atau penemunya.

Dari suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁹

2. Merek

Pengertian merek secara terminologis adalah nama, tanda, simbol, atau desain atau kombinasi diantaranya, yang diitujukan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari pesaing. Beberapa bagian merek antara lain adalah nama merek, tanda merek, merek dagang, dan *copyright*.¹⁰

Sebagaimana seperti pengertian merek yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2003), h.320.

¹⁰ Venantria Sri Hadiarianati, *Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal*, (Jakarta: Unika Atmajaya, 2009), h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek dari produk barang dan jasa merupakan suatu tanda pengenal bagi pemegang hak atas merek dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis, dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau bisa merek jasa. Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan atau pedagang lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis.¹¹

Disamping, Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Dengan kata lain, merek membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis itu dari macam mereknya, sehingga terdapat daya pembeda dari antaranya. Dalam hal ini barang atau jasa yang baik dengan suatu merek tertentu dapat bersaing dengan suatu merek produk barang dan jasa yang lain.

¹¹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1990), h.45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendaftaran Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menetapkan bahwa suatu barang atau jasa dapat dimintakan pendaftaran mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan, hal ini tercantum lebih lanjut terhadap kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa suatu barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran mereknya harus sesuai dengan kelas barang yang bersangkutan, karena kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

4. Perlindungan Merek

Dalam pendaftaran merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹²

¹² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), h.163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dikemudian hari produk usaha dagang milik Opetriani tersebut beredar di pasar dengan tidak mendapat izin dari pemegang hak atas merek terdaftar, maka akan timbul hak-hak dari hak kekayaan intelektual untuk melindungi produknya tersebut. Hal ini akan menjadi sangat penting bukan hanya dari segi perlindungan hukum, tetapi karena dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemegang hak merek terdaftar.

F. Metode Penelitian**1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian terhadap penerapan aturan hukum pada masyarakat.¹³ Dalam hal ini literatur-literatur yang digunakan adalah literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan gejala dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁴ Penelitian deskriptif ini juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keadaan dan

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h.96.

¹⁴ *Ibid.*, h.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejadian sekarang.¹⁵ Tujuan penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari sumber atau objeknya.¹⁶ Seperti yang diperoleh dari metode pengamatan (observasi) ataupun wawancara yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang penulis peroleh dari literatur tentang teori-teori hukum. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, maka data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data-data sekunder yang terdiri dari:
 - a) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu sebagai bahan hukum penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti pendapat-pendapat ahli yang memuat jurnal-jurnal hukum, literatur-

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.25.

¹⁶ *Ibid.*, h.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

literatur hukum serta berbagai hasil internet dengan menyebut isinya.

- c) Bahan Hukum Tersier, untuk bahan hukum tersier diperoleh dari kamus atau ensiklopedia yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹⁷ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel Kepala Dinas Perdagangan, Pemilik, serta Karyawan. Teknik sampling yang digunakan penulis adalah Purposive Sampling, maksudnya adalah penelitian menentukan sendiri sampel yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu.¹⁹

Tabel I.1

Daftar Populasi

NO	Responden	Populasi	Presentase
1	- Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang	1 Orang	100 %

¹⁷ Burhan Ashofa, *Op.cit.*, h.78.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.8.

¹⁹ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Sumatera Barat		
3	- Pemilik KMS	2 Orang	100 %
4	- Karyawan KMS	8 Orang	100 %
Jumlah		11 Orang	

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data, antara lain:

- a. Observasi, merupakan suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan atau melanjutkan suatu penelitian.²⁰ Yakni dengan melakukan pengamatan langsung pada tempat penelitian.
- b. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan responden yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti.²¹

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h.24.

²¹ M. Hajar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011), h.53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari tau informasi dengan cara membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan-bahan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

5. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, maka penulis menjelaskan data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum untuk dianalisa.

6. Analisis Data

Analisa data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisa secara sistematis dalam penelitian ini menjalankan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisa kualitatif dalam penelitian menjabarkan secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu data yang diperoleh dari wawancara diolah dengan cara mengelompokkan dan memilih menurut jenisnya, data atau bahan yang bersifat kualitatif dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan rinci sesuai dengan masalah pokok. Selanjutnya analisa data bersifat induktif, yaitu analisa berdasarkan data yang diperoleh. Metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²² Dengan metode induktif ini, penelitian menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematis penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-sub, sehingga antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang tinjauan lokasi penelitian.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

²² Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h.66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini membahas tentang gambaran umum tentang (judul skripsi).

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Merek Usaha Dagang Sate KMS di Kota Padang).

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP

Merupakan bab kesimpulan dan saran, dalam bab ini akan disampaikan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Disamping ini juga akan disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut perlindungan merek bagi pemegang hak merek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Padang

Kota Padang merupakan kawasan rantau. Wilayah ini ditempati oleh perantau Minangkabau yang berasal dari dataran tinggi atau lebih dikenal dengan darek. Pada awalnya, mereka menempati wilayah perkampungan yang berada di pinggiran selatan, Batang Arau. Pada saat ini, wilayah tersebut diberi nama Seberang Padang.

Pada zaman dahulu, wilayah ini berada di bawah pengaruh kekuasaan Pagaruyung. Namun, sekitar abad ke-17, wilayah ini masuk ke dalam kedaulatan kesultanan Aceh. Hadirnya pendatang ke kota ini membawa perkembangan yang sangat pesat. Para pendatang ini, menetapkan dan memajukan perekonomian Kota Padang. Perkembangan tersebutlah yang pada akhirnya mendorong untuk terbentuknya sebuah struktur pemerintahan.

Akan tetapi, kedatangan penjajah Belanda menghapuskan pengaruh Kesultanan Aceh di wilayah tersebut. Pada tahun 1663 VOC datang ke Padang dan kemudian tertarik untuk membangun pelabuhan serta permukiman baru di pantai barat Sumatera. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah akses masuknya perdagangan dengan kawasan pedalaman di Minangkabau. Pada akhirnya, Belanda secara perlahan-lahan berhasil menanamkan pengaruhnya di sepanjang Pantai Barat Sumatera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Belanda juga ingin melanjutkan hubungan kerjasama dalam hal perdagangan dan pendistribusian emas ke kota tersebut dengan mengirimkan surat kepada Raja Pagaruyung. Pada tanggal 7 Agustus 1669 sempat terjadi pergejolakan antara masyarakat Pauh dan Koto Tangah. Tanggal tersebutlah yang kemudian dijadikan sebagai dasar lahirnya Kota Padang. Namun, pada akhirnya pergejolakan tersebut dapat diatasi oleh VOC yang membuat keadaan kembali aman dan terkendali.

Kota Padang kemudian berkembang dengan semakin pesat dan ramai. Sehingga membuat wilayah tersebut menjadi cocok untuk tempat mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman Minangkabau. VOC terus melakukan usaha agar mendapatkan keuntungan lebih besar. Salah satunya adalah dengan mengadakan kontrak dengan pemerintah Padang dan kemudian pada akhirnya berhasil memonopoli serta memperoleh keuntungan. Dengan kontrak tersebut membuat Belanda mendapatkan keuntungan besar. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya catatan sejak tahun 1770 diberangkatkannya 0.3 miliar pikul lada dan 0.2 miliar gulden emas pertahunnya dari Pelabuhan Muara.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Mr. Abubakar Jaar diangkat menjadi walikota pertama Kota Padang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau merupakan seorang pamong sejak zaman Belanda yang kemudian menjadi residen di Sumatera Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Letak Geografis Kota Padang

Kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatera, dengan luas keseluruhan 694,96 km² atau setara dengan 1,65% dari luas provinsi Sumatra Barat. Lebih dari 60% dari luas Kota Padang berupa perbukitan yang ditutupi oleh hutan lindung. Hanya sekitar 205,007 km² wilayah yang merupakan daerah efektif perkotaan. Daerah perbukitan membentang di bagian timur dan selatan kota. Bukit-bukit yang terkenal di Kota Padang di antaranya adalah Bukit Lampu, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, dan Bukit Pegambiran. Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 68,126 km di daratan Sumatra. Selain itu, terdapat pula 19 buah pulau kecil, di antaranya yaitu Pulau Sikuai dengan luas 4,4 ha di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Pulau Toran seluas 25 ha dan Pulau Pisang Gadang di Kecamatan Padang Selatan.

Pada tahun 1833, Residen James du Puy melaporkan terjadi gempa bumi yang diperkirakan berkekuatan 8.6-8.9 skala richter di Padang yang menimbulkan tsunami. Sebelumnya pada tahun 1797, juga diperkirakan oleh para ahli pernah terjadi gempa bumi berkekuatan 8.5-8.7 skala richter, yang juga menimbulkan tsunami di pesisir Kota Padang dan menyebabkan kerusakan pada kawasan Pantai Air Manis. Pada 30 September 2009, kota ini kembali dilanda gempa bumi berkekuatan 7,6 skala richter dengan titik pusat gempa di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laut pada 0.84°LS dan 99.65°BT dengan kedalaman 71 km, yang menyebabkan kehancuran 25% infrastruktur yang ada di kota ini.²³

Ketinggian di wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 m sampai 1.853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Suhu udaranya cukup tinggi, yaitu antara 23°C-32°C pada siang hari dan 22°C-28°C pada malam hari, dengan kelembabannya berkisar antara 78%-81%.²⁴ Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan. Tingginya curah hujan membuat kota ini cukup rawan terhadap banjir. Pada tahun 1980 2/3 kawasan kota ini pernah terendam banjir karena saluran drainase kota yang bermuara terutama ke Batang Arau tidak mampu lagi menampung limbah air tersebut.

Adapun batasan-batasan wilayah Kota Padang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- Sebelah Timur : Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Samudera Hindia

²³ <https://padangkota.bps.go.id>

²⁴ <http://www.padang.go.id/v2/content/view/16/28/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1

Luas Wilayah Kota Padang

NO	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	Teluk Kabung	100,78 km ²
2.	Kecamatan Koto Tengah	Lubuk Buaya	232,25 km ²
3.	Kecamatan Kuranji	Kalumbuk	57,41 km ²
4.	Kecamatan Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	30,91 km ²
5.	Kecamatan Lubuk Kilang	Bandar Buat	85,99 km ²
6.	Kecamatan Nanggalo	Nanggalo	8,07 km ²
7.	Kecamatan Padang Barat	Belakang Tangsi	7,00 km ²
8.	Kecamatan Padang Selatan	Seberang Padang	10,03 km ²
9.	Kecamatan Padang Timur	Simpang Haru	8,15 km ²
10.	Kecamatan Padang Utara	Ulak Karang	8,08 km ²
11.	Kecamatan Pauh	Cupak Tengah	146.29 km ²

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang 2016

Kota Padang memiliki karakteristik ruang perkotaan yang menghadap Samudra Hindia dan dikelilingi oleh jajaran Pegunungan Bukit Barisan. Perkembangan kawasan urban di Padang bergerak ke arah utara dan timur dari kawasan kota tua di muara Batang Arau. Penataan wilayah kota saat ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030. Sejalan dengan pembangunan kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbasis mitigasi bencana, wilayah timur Padang dikembangkan sebagai kawasan permukiman dan pusat pendidikan, sedangkan wilayah barat yang berdekatan dengan pantai merupakan kawasan komersial perkotaan dan pusat bisnis. Pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang ke wilayah timur (Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah) pada tahun 2010 adalah salah satu upaya mengurangi konsentrasi penduduk di kawasan pinggir pantai.

C. Kependudukan

Kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di provinsi Sumatra Barat. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Padang tahun 2018 adalah sebanyak 1.408.849 jiwa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang melaporkan jumlah penduduk sebanyak 1.408.849 jiwa yang terdiri dari 469.737 orang laki-laki dan 939.112 perempuan.

Tabel II.2**Jumlah Penduduk Kota Padang Tahun 2018**

NO	Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bungus Teluk Kabung	12.972	25.174	38.146
2.	Lubuk Kilang	28.362	56.214	84.576
3.	Lubuk Begalung	62.368	123.167	185.535
4.	Padang Selatan	30.133	59.962	90.095
5.	Padang Timur	39.644	79.610	119.254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Padang Barat	23.279	46.055	69.334
7.	Padang Utara	33.711	70.951	104.662
8.	Nanggalo	29.951	61.559	91.510
9.	Kuranji	74.366	149.307	223.673
10.	Pauh	37.259	73.686	110.945
11.	Koto Tengah	97.692	193.427	291.119
Jumlah Keseluruhan		469.737	939.112	1.408.849

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk laki-laki paling sedikit berada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan jumlah 12.972 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan jumlah 25.174 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki terbanyak terdapat di Kecamatan Koto Tengah dengan jumlah 97.692 jiwa dan jumlah penduduk perempuan terdapat di Kecamatan Koto Tengah dengan jumlah 193.427 jiwa. Jumlah penduduk keseluruhan paling sedikit terdapat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan jumlah penduduk 38.146 jiwa, dan jumlah penduduk keseluruhan terbanyak di Kecamatan Koto Tengah 291.119 jiwa.

D. Sejarah Usaha Dagang Sate KMS

Usaha Dagang Sate KMS ini merupakan bisnis keluarga yang diturunkan dari M.Rusli dan Yusnimar kepada anaknya. Bisnis ini dimulai pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1984, pertama kali dijual di Blok A Pasar Raya Padang. Sate ini berasal dari Pariaman. Setelah M.Rusli meninggal, usaha sate ini dikembangkan anak dan keponakannya di Padang. Usaha Sate KMS ini terdapat 4 cabang, yaitu di Permindo, Patimura, Kalawi, dan Siteba. Cabang Permindo dan Patimura yang dikelola oleh Santi Sofia, cabang Kalawi dikelola oleh Opetriani dan cabang Siteba dikelola oleh Ilyas.

Cabang Permindo terdapat di Jl. Permindo No.3 Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat. Memiliki 6 karyawan yang bernama Danil, Muslim, Sherly, Rezky, Faizal, dan Tika. Cabang Patimura terdapat di Jl. Patimura No.2 Olo, Kecamatan Padang Barat. Memiliki 4 karyawan yang bernama Fajar, Fauzan, Fadila, dan Ilham. Cabang Kalawi terdapat di Jl. Kampung Kalawi, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Memiliki 5 karyawan yang bernama Putri, Fani, Dian, Zikri, dan Heru. Cabang Siteba terdapat di Jl. Raya Siteba No.67B Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Memiliki 5 karyawan yang bernama Putra, Arif, Della, Fitri, dan Rahmat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Merek, Hak Atas Merek dan Pemilik Merek

1. Pengertian Merek

Merek merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usulnya suatu barang atau jasa yang sekaligus juga menjadi pembeda dari barang-barang dan jasa-jasa yang lain.²⁵

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa merek:

- a. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut.
- b. Memiliki daya pembeda (*distinctive*) dengan merek lain yang sejenis.
- c. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.

²⁵ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin M, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenisnya yang dibuat oleh pihak lainnya.

2. Pengertian Hak Atas Merek dan Pemilik Merek

Hak cipta harus dapat melindungi ekspresi dari suatu ide gagasan konsep, salah satu cara untuk melindungi suatu hak cipta tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dalam pendaftaran merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.

Pemilik Merek merupakan pemohon yang telah disetujui permohonannya dalam melakukan pendaftaran merek secara tertulis kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Fungsi dan Manfaat Merek

Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek.²⁶ Pemberian merek terhadap barang dan jasa akan mempengaruhi citra perusahaan di mata konsumen atau dapat dikatakan akan menaikkan citra perusahaan. Pemberian merek ini juga akan menunjukkan jaminan kualitas dari barang dan jasa tersebut dan juga berusaha mencegah terjadinya peniruan. Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.²⁷

Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa

²⁶ Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, h. 34.

²⁷ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Op.Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.²⁸ Oleh karena itu, merek bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tersebut tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen.

Berdasarkan fungsi dan manfaat inilah maka diperlukan perlindungan hukum terhadap produk Hak Merek, ada 3 (tiga) hal yaitu:²⁹

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pemilik merek atau pemegang hak merek.
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak.
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha merek.

C. Persyaratan Merek dan Iktikad Baik

Suatu merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak, yaitu berupa adanya daya pembeda yang cukup. Maksudnya, tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu produk dari produk lainnya. Untuk mempunyai daya

²⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 320.

²⁹ Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan.³⁰ Di dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa pemohon kepemilikan harus beritikad baik, yaitu dengan mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibatkan kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran pada kantor merek dengan memenuhi segala persyaratan merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran juga harus mempunyai itikad baik. Adapun prosedurnya sebagai berikut:³¹

1. *Application* atau permohonan
2. Persyaratan formal
3. Pengumuman dan publikasi
4. Sanggahan dan keberatan
5. Pemeriksaan substansi
6. Penerimaan dan penolakan

³⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op, Cit.*, h.156.

³¹ Budi Santoso, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2009), h.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Banding atas penolakan

D. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa didaftarkan merek tersebut negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Merek harus merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau kemasan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi tidak mempunyai kekuatan pembeda, maka dianggap bukan suatu merek. Oleh karena itu, tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftarkan sebagai sebuah merek.³²

Permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik juga tidak dapat didaftarkan. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan adanya ketentuan ini, jelaslah bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan dan ditolak bila pemiliknya beritikad buruk. Selain itu, menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

³² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op, Cit.*, h.156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitaas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Menurut Sudargo Gautama, permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, apabila mereka tersebut:³³

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional (termasuk

³³ Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik) maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

Selain itu, menurut Adrian Sutedi, ada beberapa tanda yang tidak boleh dijadikan Merek, yakni sebagai berikut:³⁴

- a. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit, atau garis yang kusut
- b. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau gambar yang menyinggung perasaan keagamaan
- c. Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang
- d. Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas
- e. Kata-kata umum, misalnya kata rumah atau kota

Dengan demikian, dari ketentuan di atas, tidak semua tanda dapat didaftarkan sebagai merek. Hanya tanda-tanda yang memenuhi syarat dibawah ini yang dapat didaftarkan sebagai merek, yaitu:

- a. Mempunyai daya pembeda

³⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Merupakan tanda barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut
- c. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; bukan tanda bersifat umum dan tidak menjadi milik umum; atau bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
- d. Tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dahulu, merek terkenal, atau indikasi geografis yang sudah dikenal
- e. Tidak merupakan, menyerupai atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau negara tertentu

E. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Hak khusus memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Tentunya hak atas merek ini hanya diberikan kepada pemilik yang beritikad baik. Pemilik yang beritikad buruk, mereknya tidak dapat didaftar. Pemakai merek terdaftarnya bisa untuk produk barang maupun jasa. Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.³⁵

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang, sedangkan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek

³⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op, Cit.*, h.156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdaftar dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan, sebagaimana yang termuat dalam ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar dengan dikenai biaya. Dan permohonan perpanjangan masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.³⁶

Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.³⁷

F. Perlindungan Atas Pelanggaran Merek Terdaftar

1. Gugatan

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan yaitu

³⁶ Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³⁷ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dari bunyi Pasal 83 ini, dapat diketahui jenis bentuk gugatan perdata atas pelanggaran merek terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immateril. Ganti rugi materil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateril berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.³⁸

2. Pengadilan Niaga

Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili

³⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995), h.304-305.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus. Pemberdayaan Pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga.

Pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan hak kepada hakim untuk melakukan tindakan tertentu, selama pemeriksaan masih berlangsung, yaitu bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan pemilik merek selaku penggugat dapat memerintah tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Adapun tindakan untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak dengan menggunakan tata cara gugatan pembatalan merek terdaftar pada Pengadilan Niaga (diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, hakim Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara pengadilan, sebagaimana tercantum pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengarkan keterangannya bila penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan, jika hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.³⁹ Dan bila penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek, serta pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan bila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.⁴⁰

³⁹ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴⁰ Penjelasan Pasal 97 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penetapan Sementara Pengadilan

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, hakim Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur perdagangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menertibkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importisasi.
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggaran menghilangkan barang bukti.
- c. Pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar.
- d. Penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:⁴¹

- a. Melampirkan bukti kepemilikan merek, yaitu Sertifikat Merek atau surat pencatatan perjanjian lisensi bila pemohon penetapan adalah penerima lisensinya.
- b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Merek.
- c. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian.
- d. Menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengarkan keterangannya bila penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan. Jika hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk menguatkan atau

⁴¹ Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatalkan penetapan sementara pengadilan.⁴² Bila penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek, serta pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan bila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.⁴³

4. Arbitrase

Penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa disini, bisa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya.

⁴² Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴³ Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, h.117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Ketentuan Pidana Hak atas Merek

Hak atas merek yang merupakan hak milik perseorangan tentunya memiliki tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Merek. Dengan kata lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu adanya ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Tindakan pidana ini merupakan tindakan pidana kejahatan yang ancaman hukuman pidananya diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mencantumkan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar. Selanjutnya Pasal 102 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bagi siapa saja yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana kurungan atau denda.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian merek usaha dagang Sate KMS menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ada 4 cara. Pertama, dapat mengajukan gugatan perdata. Kedua, pemegang merek dapat juga mengajukan gugatan pidana. Ketiga, pemegang merek yang dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan. Keempat, arbitrase yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan sebagainya. Namun, pemegang merek tidak melakukan upaya gugatan perdata ataupun pidana. Pemegang merek hanya melakukan upaya peneguran kepada pihak yang menggunakan merek tersebut sebelumnya. Setelah adanya pemberitaan pihak yang menyalahgunakan merek KMS tersebut, pemegang merek melakukan klarifikasi ke media online, televisi, dan media cetak. Terakhir, pemegang merek meminta bantuan Dinas Perdagangan untuk melakukan pengecekan BPOM di setiap cabang Sate KMS.
2. Dalam penyelesaian merek usaha dagang Sate KMS yang digunakan pihak lain terdapat beberapa kendala yang dialami pemegang merek. Pertama, pihak yang menyalahgunakan merek Sate KMS sudah diamankan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang berwajib. Kedua, kurangnya pengetahuan pemegang merek soal hukum. Ketiga, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah, dibuktikannya tidak tahunya pemegang merek apa saja proses yang dapat dilakukan atau tidak tahu bagaimana cara melindungi hak mereknya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik usaha atau pemilik merek sebaiknya mendaftarkan mereknya agar bisa mempertahankan haknya dan menjaga haknya secara hukum dan tidak merugikan pihak lain.
2. Kepada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat disarankan untuk melakukan sosialisasi kepada pemegang merek tentang hak-hak yang diperoleh oleh para pemegang merek. Sehingga, apabila ada penyalahgunaan merek oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, para pemegang merek paham bagaimana upaya penyelesaiannya, baik secara pidana maupun secara perdata.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, Jakarta, CV Akademika Pressindo, 1990.
- Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ashhofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hajar, M, *Metode Penelitian Hukum*, Pekanbaru Uin Suska Riau, 2011.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta, Yustisa, 2010.
- Haris, Munandar, dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Erlangga Esensi, 2009.
- Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin M, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 1995.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Santoso, Budi, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang, Pustaka Magister, 2009.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007.

Sri Hadiarianati, Venantria, *Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal*, Jakarta, Unika Atmajaya, 2009.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014.

Suryo Utomo, Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.

Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Tjiptono, Fandy, *Stratategi Pemasaran*, Yogyakarta, CV Andi Offest, 2008.

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung Alumni, 2003.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, dengan Bapak Endrizal.

Wawancara dengan karyawan Sate KMS.

Wawancara dengan pemilik atau penanggungjawab Sate KMS dengan Ilyas.

WEBSITE

<https://padangkota.bps.go.id>

[http://www.educationalwriting.net/resource_center/Thesis/Writing/pemeganghakatas
mere.htm](http://www.educationalwriting.net/resource_center/Thesis/Writing/pemeganghakatas
mere.htm).

<http://www.padang.go.id/v2/content/view/16/28/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "HAK MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS STUDI KASUS MEREK USAHA DAGANG SATE KMS DI KOTA PADANG)", yang ditulis oleh:

Nama : ULFA NOVITA SARI
NIM : 11527202360
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 12 November 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

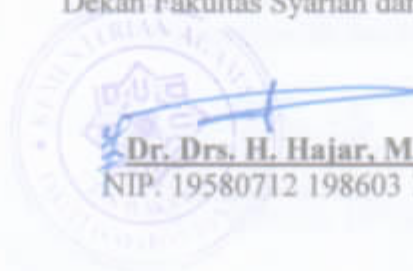
Sekretaris
Iham Akbar, SHI, SH., MH

Penguji I
Turhidayat, SH., MH

Penguji II
Sril, SHL., MH

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/23784
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U/00F/PP.00.4956/2019 Tanggal 21 Mei 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ULFA NOVITA SARI |
| 2. NIM / KTP | : 11527202360 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERLINDUNGAN MEREK BAGI PEMEGANG HAK MEREK USAHA
DAGANG SATE KMS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK |
| 7. Lokasi Penelitian | : SATE KMS KOTA PADANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Juni 2019

UIN SUSKA RIAU



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.070 / 731 - PERIZ/DPM&PTSP/VI/2019

Rekomendasi Penelitian

- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
- Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/23784 tanggal 28 Juni 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Sehingga menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- : ULFA NOVITA SARI
- : Padang, 09 Agustus 1996
- : Mahasiswa
- : Jorong Koto Baru Kubang Putih Kec.Banuhampu Kab.Agam
- : 1306064908960002
- : PERLINDUNGAN MEREK BAGI PEMEGANG HAK MEREK USAHA DAGANG SATE KMS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN IDIKASI GEOGRAFIS DI KOTA PADANG
- : Sate KMS Kota Padang
- : 22 Juli 2019
- : Ulfa Novita Sari

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
- Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Keterliban di daerah setempat;
- Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Dimikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 Juli 2019

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MASWAR DEDI, AP. MSI
NIP. 19740618 199311 1001

dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Tembusan:

- Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
- Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





PEMERINTAH KOTA PADANG KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Balaikota Padang, Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1, By. Pass Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 200.07.1639/Kesbangpol/2019

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

2. Surat dari : Ka.DPM & PTSP Prov. Sumbar

Nomor : B.070/731-PERIZ/DPM & PTSP/VI/2019

tanggal 04 Juli 2019

3. Surat Pernyataan Penanggung Jawab penelitian Ybs,

tanggal 25 Juli 2019

Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian/ Survey/ Pemetaan/ PKL/ PBL (Pengalaman Belajar Lapangan di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

Nama	: Ulva Novita Sari
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang, 09 Agustus 1996
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
Alamat	: Koto Baru Kubang Putih Kab.Agam
Nomor Handphone	: 082285151665
Maksud Penelitian	: Skripsi
Waktu Penelitian	: 3 (tiga) bulan
Judul Penelitian/Survey/PKL	: Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Usaha Dagang Sate KMS Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Kota Padang
Tempat Penelitian	: Dinas Perdagangan Kota Padang,
Anggota Rombongan	: --

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ber kewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian.

2. Pelaksanaan Penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di Daerah setempat/ lokasi Penelitian.

3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Walikota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang dalam kesempatan pertama.

4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/ tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 25 Juli 2019

A.n Walikota Padang
Kepala Kantor Kesbang dan Politik
Kasi Ketahanan dan SBAKE

TAMRIN, SH
NIP.19681101 199103 1 007

Diteruskan Kepada :

1. Yth : DPM & PTSP Sumbar
2. Yth : Yang bersangkutan
3. Ptertinggal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERDAGANGAN

Alamat : Jln Khatib Sulaiman No. 67 Padang
Email : disperdagangan@padang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070.L.2386 .VIII/Dg-2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang,
menyatakan bahwa :

: **Ulva Novita Sari**
: 11527202360
Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 09 Agustus 1996
Alamat : Koto Baru Kubang Putih Kab. Agam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Hasim Riau

Sebagai mahasiswa tersebut diatas benar telah selesai melakukan penelitian pada
Dinas Perdagangan Kota Padang mulai tanggal 25 Juli 2019 s/d 29 Agustus 2019,
dengan judul penelitian "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Usaha
Daerah Sate KMS Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis di Kota Padang".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 29 Agustus 2019
Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang



H. ENDRIZAL, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.19690703 199503 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Padang, 29 Juli 2019

Yang beranda tangan di bawah ini:

: ILYAS

: PEMILIK MEREK KMS

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

: Ulfa Novita Sari

: 11527202360

: IX

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai dan benar melakukan penelitian di Usaha Dagang Sate KMS Cabang Seba, terhitung mulai tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PENERLINDUNGAN MEREK BAGI PEMEGANG HAK MEREK USAHA DAGANG SATE KMS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN IDIKASI GEOGRAFIS DI KOTA PADANG".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pemilik Sate KMS,





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

OPETRIANI
Jl. Belakang Olo No. 39
Padang

KMS

4 Juni 2009

IDM000285034

16 Desember 2010

UIN SUSKA RIAU

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

u.b.

Direktur Merek

Yuslisar Ningsih, SH., MH.
NIP. 195511291982032001



(730) Nama dan Pemilik Merek
OPETRIANI
II. Belakang Olo No. 39
Padang

(740) Nama dan Konsultan HKI:

Pemeriksa Merek
Irnig Melayunita, SS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ulfa Novita Sari lahir di Padang 9 Agustus 1996, anak dari Ayahanda Djonsirwan dan Ibunda Sulastri. Merupakan anak terakhir dari 4 (empat) bersaudara. Mengawali pendidikan di TK Masyithah, selesai pada tahun 2002. Selanjutnya SD Negeri 01 Ladang Laweh, selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Banuhampu, selesai pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan ke SMA Negeri 1 Banuhampu, selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum. Selama dibangku perkuliahan penulis, melaksanakan kegiatan magang di awal tahun 2018 di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu penulis juga aktif dalam berorganisasi. Penulis pernah menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2016-2017. Penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Judul Skripsi **“HAK MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS MEREK USAHA DAGANG SATE KMS DI KOTA PADANG)”** Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 12 November 2019 dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).